

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis serta penelitian yang dilakukan di lapangan yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan dari hasil implementasi kebijakan PNPM-MPd di Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong terkait pembangunan sarana dan prasarana yaitu pengaspalan jalan sebagai berikut:

- 1) Implementasi kebijakan PNPM-MPd di Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong terkait pembangunan sarana dan prasarana yaitu pengaspalan jalan pada tahun 2014 telah sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Belanja) dan petunjuk teknis.
- 2) Implementasi kebijakan PNPM-MPd di Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong terkait pembangunan sarana dan prasarana yaitu pengaspalan jalan pada tahun 2014 secara umum sudah berjalan dengan baik namun masih ada beberapa hal seperti masalah sosialisasi yang masih terbatas musyawarah desa tanpa melibatkan media cetak dan elektronik.
- 3) Keberadaan jalan aspal menjadi banyak manfaat bagi transportasi roda ekonomi Desa Dharma Tanjung terutama Dusun Daman.
- 4) Kesadaran masyarakat yang aktif terlibat dalam proses implementasi kebijakan PNPM-MPd ini, juga menjadi faktor pendukung pengaspalan jalan ini berjalan dengan baik.

5) Manajemen organisasi internal seperti komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur organisasi sudah cukup baik, hal ini terlihat jarang terjadi tumpang tindih tugas satu dengan yang lainnya. Masing-masing petugas telah mengetahui fungsi dan perannya masing-masing.

B. Saran

Saran yang dapat ditawarkan oleh peneliti dari hasil pengamatan di lapangan adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi secara berkelanjutan dan berkala serta dilakukan secara lebih massif. Sosialisasi tersebut bisa dilakukan dengan cara memanfaatkan media cetak dan elektronik yang sudah ada di Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong.
2. Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan para kader-kader desa yang direkrut agar lebih ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan. mengingat para pelaku PNPM-MPd ini secara langsung menjadi ujung tombak program yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam membina, mendampingi, serta mengarahkan masyarakat dalam menjalankan kegiatan.
3. Diharapkan dalam setiap pelaksanaan kegiatannya terdapat pengawasan yang lebih baik oleh masyarakat, badan pengawas kegiatan yang telah dibentuk maupun oleh pemerintah daerah, karena program PNPM Mandiri ini rentan akan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).